



Reforma Agraria Satu Pintu

Redistribusi tanah oleh MBT itu jelas melanggar konstitusi karena mengambil alih kewenangan dan tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan untuk tercapainya seba-

Tanah negara sedemikian itu (bebas tanah hak) dapat dikembalikan kepada masyarakat adat yang semula melepaskan tanah ulayatnya, dengan catatan: jika masyarakat adat yang bersangkutan masih ada dan bersedia mengelola kembali tanah ulayat/wilayahnya. Secara

Implementasi PSN wajib diawali dengan menerapkan *free and prior informed consent* (FPIC) dengan masyarakat yang menguasai/memiliki tanah.

10 of 10

[illegible]